

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005: 4). Data yang dikumpulkan dapat berupa naskah-naskah wawancara, foto, catatan di lapangan, dokumen pribadi, ataupun memo.

Penelitian ini telah mendeskripsikan proses yang berkenaan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku kinerja suatu individu atau organisasi, terkait kinerja Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menegakkan produk hukum daerah, khususnya Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung dengan menjaga ketertiban kota. Dikaitkan dengan jenis penelitian, maka dalam penelitian ini jenis penelitian deskriptif digunakan untuk melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam masalah penelitian yaitu seputar pengetahuan, sikap dan perilaku kinerja Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menegakkan produk hukum daerah untuk dapat menarik kesimpulan tentang pelaksanaan yang ditunjukkan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung.

Representasi itu dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala sebagai data atau fakta sebagaimana adanya. Kemudian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi fokus penelitiannya adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa profesionalitas Satpol PP dalam menegakkan produk hukum daerah Kota Bandar Lampung khususnya Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, yang lebih menekankan pada pengetahuan, sikap dan perilaku dari Satpol PP dalam menjaga ketertiban kota khususnya menjaga ketertiban PKL. Adapun indikator dalam mencapai profesionalitas dalam menjaga ketertiban kota adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab, adalah tanggung jawab Satpol PP sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanggung jawab kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yakni :
 - a. Tanggung jawab pelaksanaan (*by function*), merupakan tanggung jawab Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya adapun tanggung jawab yang dilakukan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban dimulai dari perencanaan program penertiban, pelaksanaan/eksekusi penertiban terhadap PKL yang

melanggar hingga tanggung jawab secara sikap dan tindakan dalam melaksanakan penertiban.

Kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP, tidak selalu terlaksana secara sempurna. Adanya PKL yang luput dari pelaksanaan penertiban salah satu kesalahan yang dilakukan Satpol PP. Hal tersebut yang memicu pendapat bahwa rasa tanggung jawab dari Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya belum sepenuhnya terpenuhi.

- b. Tanggung jawab dampak (*by profession*), merupakan tanggung jawab Satpol PP dalam menangani dampak yang mungkin terjadi setelah pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap PKL yang melanggar. Tanggung jawab dampak ini ditunjukkan oleh Satpol PP dengan melakukan patroli secara mendadak untuk menghimbau dan merazia PKL yang melanggar, membangun pos jaga di area Pasar Bambu Kuning untuk meminimalisir pelanggaran ketertiban hingga penempatan anggota Satpol PP di sekitaran Pasar Bambu Kuning untuk mencegah adanya PKL yang mencari kesempatan berjualan ditempat yang dilarang.

Pelaksanaan patroli, penjagaan dan penempatan anggota Pol PP untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketertiban umum jauh dari keadaan yang sempurna. Kegiatan patroli yang dilakukan tidak sepenuhnya dijalankan secara menyeluruh di tiap-tiap area vital kota yang memungkinkan PKL untuk kembali berjualan dipinggir-pinggir jalan.

Penjagaan diarea Pasar Bambu Kuning kerap dimanfaatkan oknum “nakal” yang mengatasnamakan Satpol PP untuk meminta iuran keamanan yang tentunya ilegal apabila PKL tidak ingin terkena razia dan PKL bisa mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan penertiban. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab anggota Pol PP dalam mengatasi dampak pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya dilaksanakan.

- 2) Kebebasan, adalah kebebasan tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang diberikan kepada Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menciptakan aturan-aturan organisasi dan program-program yang dapat mengembangkan organisasinya agar menjadi perangkat daerah yang lebih baik dan profesional.

Kebebasan yang dilakukan oleh Satpol PP merujuk pada pengembangan secara kepribadian dan organisasi. Penciptaan aturan-aturan kerja dan program-program pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan kerja anggota, pemahaman mengenai tanggung jawab kerja dan prosedur kerja serta penanaman mengenai besarnya peran Satpol PP dalam pelaksanaan pemerintahan Kota Bandar Lampung. Kebebasan juga diberikan kepada Satpol PP untuk menangani permasalahan ketertiban umum yang tentunya didasarkan pada norma-norma perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan penertiban dan penjagaan ketertiban, kebebasan yang diberikan dimulai dari perencanaan program penertiban hingga kebebasan bertindak secara *nonyustisial* apabila oknum PKL yang diperingati tetap mengindahkan peringatan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kebebasan tersebut dinodai dengan terlalu berlebihannya tindakan yang dilakukan oknum Satpol PP dalam penertiban PKL yang melanggar. Sikap kasar terhadap wanita/ibu-ibu, hingga pengrusakan terhadap barang dagangan PKL dinilai sangat merugikan pedagang kecil. Hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh Satpol PP dalam mengelola anggota dan organisasinya untuk menjadi aparaturnya yang profesional.

- 3) Keadilan, adalah keadilan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung dengan melaksanakan tugas dan fungsi dengan tidak memihak manapun dan siapapun agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan orang lain.

Sebagai salah satu aparaturnya publik, sikap adil adalah sikap utama yang harus dimiliki Satpol PP Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan penertiban, keadilan ditunjukkan dengan menertibkan setiap PKL yang melanggar tanpa adanya ketimpangan. Penertiban dilakukan dengan menyita setiap barang dagangan PKL yang melanggar dan pemnidahan tempat terhadap PKL secara menyeluruh disatu tempat sehingga kecemburuan sosial diantara pedagang dapat diatasi.

Namun, keadaan yang ada dilapangan jauh dari keadaan yang mencerminkan sikap adil bagi PKL. Penertiban memang dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkesan ada indikasi pilih kasih sebab ditemukan beberapa PKL yang tidak diangkut barang dagangannya bahkan ada yang tidak terkena razia. Hal lainnya, dalam perelokasian PKL terkesan tidak seimbang dan sebanding dikarenakan masih adanya PKL yang kembali berjualan disekitaran Pasar Bambu Kuning yang menimbulkan adanya pendapat dari pedagang bahwa diantara PKL dan “oknum” Satpol PP melakukan permainan dengan melakukan iuran gelap. Tentunya kondisi tersebut tidak mencerminkan sikap adil yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL yang dirazia dan secara sukarela pindah ke tempat yang ditentukan Pemkot Bandar Lampung.

2. Faktor-faktor penghambat profesionalitas yang dihadapi Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam menegakkan Perda No. 8 Tahun 2000. Secara umum faktor-faktor dikategorikan ke dalam dua kategori, yakni faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

Hambatan internal yang dihadapi Satpol PP berkaitan dengan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas. Minimnya pendapatan/upah yang diterima oleh anggota Pol PP dapat mengurangi tingkat kinerja anggota Pol PP, sebab dari minimnya upah yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan dan dilaksanakan oleh anggota Pol PP. Dalam hal sarana dan prasarana, kendala yang ada berupa sedikitnya kendaraan

operasional untuk melakukan patroli keliling dan kendaraan pengangkut barang-barang PKL yang terkena razia.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan penjagaan ketertiban terkait dengan minimnya sumberdaya yang dimiliki oleh Satpol PP. Dengan minimnya sumberdaya yang dimiliki, maka dalam melaksanakan penertiban seringkali beberapa PKL ada yang tidak terkena razia/penertiban, dan dalam melakukan penjagaan ketertiban seringkali timbul masalah yang disebabkan sedikitnya anggota dalam menjaga dibandingkan dengan luasnya kawasan Pasar Bambu Kuning.

Hambatan lainnya berupa hambatan eksternal yang berasal dari luar organisasi Satpol PP. Hambatan tersebut berupa kebijakan Pemkot yang merelokasi PKL ditempat yang dianggap kurang strategis untuk berjualan, sebab kebijakan tersebut dapat merugikan pedagang kecil. Dengan kurang baiknya program relokasi tersebut, beberapa PKL mencoba kembali berjualan ditempat yang dilarang secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut yang dapat merugikan Satpol PP dimana dengan adanya PKL yang kembali berjualan ditempat semula dapat mengurangi nilai positif dari kinerja dan Satpol PP dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga ketertiban umum.

Hal lainnya yang menjadi hambatan Satpol PP berupa perlawanan yang dilakukan PKL dalam kegiatan penertiban. Perlawanan tersebut berupa perlawanan dalam adu argument hingga perlawanan yang mengarah ke tindakan anarkis. Dari perlawanan yang dilakukan PKL, sudah tentu sikap yang harus dilakukan oleh

Satpol PP berupa sikap secara lapang dada dan berkepala dingin dalam menyikapi tindakan PKL dan mencari jalan tengah yang adil. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP jauh lebih keras dan kasar terhadap PKL tanpa memperdulikan situasi dan kondisi. Kondisi tersebut yang menjadi penilaian di mata masyarakat bahwa Satpol PP sebagai aparatur publik terkesan tidak profesional dan arogan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena/peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Sementara itu, keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga, menjadi pertimbangan dalam lokasi penelitian.

Penelitian ini memilih Kota Bandar Lampung, yang terfokus pada sekitaran Pasar Bambu Kuning sebagai lokasi penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terlalu semerawutnya Kota Bandar Lampung karena aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di sekitaran Pasar Bambu Kuning, yang menarik untuk diteliti apabila memperhatikan pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung.

2. Adanya PKL yang kembali berjualan di pinggir jalan dan di atas trotoar yang menarik untuk diteliti terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP khususnya dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban.
3. Karena lokasi tersebut merupakan pusat perniagaan Kota Bandar Lampung yang menjadi sorotan langsung terhadap kondisi dari Kota Bandar Lampung, dan juga lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti agar dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari :

1. Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data primer ini merupakan unit analisis utama yang digunakan dalam kegiatan analisis data. Secara aplikatif data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi.

Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara terhadap kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, beberapa anggota Satpol PP, dan beberapa PKL yang dipilih secara acak. Data lainnya didapat dari hasil observasi peneliti saat pelaksanaan penertiban PKL berlangsung.

2. Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan pelaksanaan penegakkan Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 khususnya pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa surat-surat keputusan dan statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan kegiatan, foto dan dokumen lain tentang pelaksanaan penegakkan Perda Kota Bandar Lampung No. 8 Tahun 2000 khususnya pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung.

E. Informan

Langkah awal untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah dengan menentukan terlebih dahulu informan penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive* (disengaja) atau bersifat tidak acak, dan juga menggunakan teknik tidak disengaja atau bersifat acak.

Adapun informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung dan Kepala-Kepala Seksi di jajaran Satpol PP, yakni Kasat Pol PP (Drs. Cik Raden, SH. MM), Kasi Penegakkan Perda (Drs. Abu Sofian), Kasi Samapta dan Tibum (Herman Karim, SH. MM), Kasi Bimas Umum (Galih Mas, SE). Pejabat-pejabat Kantor Satpol PP tersebut merupakan fokus utama peneliti untuk mendapatkan

informasi mengenai penetapan tugas untuk anggota-anggotanya terkait dengan terciptanya sikap profesional dari Satpol PP.

2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung, merupakan pelaksana tugas dan sebagai inti untuk menilai profesional tidaknya Satpol PP. Adapun beberapa anggota Pol PP yang berhasil didapatkan informasinya adalah Supriyanto, Agusman, Doni, dan Jupriyanto.
3. Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang didapatkan informasinya adalah Udin (pedagang buah-buahan), Amrizal (pedagang pakaian), Mr. X (pedagang VCD Bajakan), Lukman (pedagang sandal dan sepatu), Agus (pedagang kacamata dan jam tangan), Nurdin (pedagang buah), Nurlaila (pedagang pakaian), Sumiarti (pedagang minuman). Pedagang-pedagang tersebut merupakan sasaran dari penerapan kebijakan dan perda yang telah ditetapkan dan juga objek yang berhadapan langsung dengan Satpol PP, dimana dalam pemilihan PKL dilakukan secara acak.

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan instrumen penelitian, antara lain :

1. Peneliti itu sendiri, sebagai instrument merupakan alat perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan menjadi pelapor hasil penelitian.
2. Perangkat penunjang lainnya, seperti ; *interview guide* (pedoman wawancara), *field note* (catatan lapangan), *tape recorder*, dan alat bantu lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam penelitian. Dalam teknik ini dilakukan serangkaian kegiatan pencatatan berbagai hasil pengamatan, gejala-gejala maupun gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

Dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data, dengan cara berinteraksi langsung ke obyek penelitian. Dalam penelitian ini, adapun kegiatan observasi yang dilakukan peneliti, dengan melihat langsung proses penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning dan pelaksanaan penjagaan ketertiban. Berdasarkan hasil observasi yang diamati peneliti dilapangan bahwa masih banyak kejanggalan dan kekurangan dari tindakan dan sikap Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan penjagaan ketertiban.

Kejanggalan yang berhasil diamati oleh peneliti berupa pelaksanaan penertiban yang tidak dilakukan secara menyeluruh ke tiap-tiap pedagang yang melanggar sehingga masih ada pedagang yang berjualan ditempat yang dilarang, dan pemaksaan dalam penyitaan barang dagangan pedagang tanpa memperhatikan kerugian materi pedagang. Sedangkan dalam pelaksanaan penjagaan ketertiban, kekurangan yang ada berupa minimnya anggota Pol PP dalam berjaga dan berpatroli serta tidak bertanggungjawabnya anggota Pol PP dalam melakukan penjagaan. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh pedagang untuk kembali berjualan ditempat yang dilarang, sehingga keadaan yang tertib masih jauh dari yang diharapkan. Didasarkan kondisi dan situasi yang berhasil diamati dari observasi yang dilakukan peneliti, maka peneliti tertarik untuk menganalisa proses pelaksanaan penertiban dan penjagaan ketertiban demi memperoleh seberapa besar kualitas keprofesionalan Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan kejelasan informasi mengenai masalah penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara telah dilaksanakan terhadap Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung beserta jajarannya, beberapa anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan beberapa PKL di Pasar Bambu Kuning.

Dari wawancara terhadap Kasat Pol PP, Kasi Penegakkan Perda, Kasi Samapta dan Tibum serta Kasi Pembinaan Umum, beberapa anggota Pol PP, dan

beberapa PKL yang dipilih secara acak, didapatkan kesimpulan mengenai pelaksanaan penertiban dan penjagaan ketertiban serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan penertiban, hasil wawancara yang diperoleh bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai dengan aturan kerja yang berlaku dan didasarkan pada Perda No.8 Tahun 2000, sedangkan dalam melakukan penjagaan ketertiban dilaksanakan dengan mengadakan patroli dadakan, penempatan anggota Pol PP di sekitaran Pasar Bambu Kuning dan membangun pos jaga Satpol PP di Pasar Bambu Kuning.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yakni dalam hal pendapatan anggota Pol PP yang minim yang dapat mengurangi semangat kerja, minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, minimnya sumberdaya yang dapat menjaga seluruh kawasan Pasar Bambu Kuning, kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang tidak memperhatikan dampak dari relokasi PKL, serta penolakan yang ditunjukkan PKL dalam pelaksanaan penertiban.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan surat-surat dan dokumen-dokumen penting terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang berhasil dikumpulkan berupa surat-surat tugas baik dari walikota atau kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung dan juga dokumen-dokumen penting terkait pelaksanaan penegakkan Perda No. 8 Tahun 2000.

H. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan, maka pengolahan data ini dilakukan dengan cara, yaitu :

1. Editing, yaitu memeriksa kembali data, kejelasan, dan relevansinya dengan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasanya sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan.
3. Tabulasi data, yaitu memasukkan data dalam bentuk tabel dan disusun ke dalam suatu pola tertentu dengan cara penghitungan.

I. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan, semakin lama akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu diperlukan reduksi data untuk memisahkan dari data-data yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini atau dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

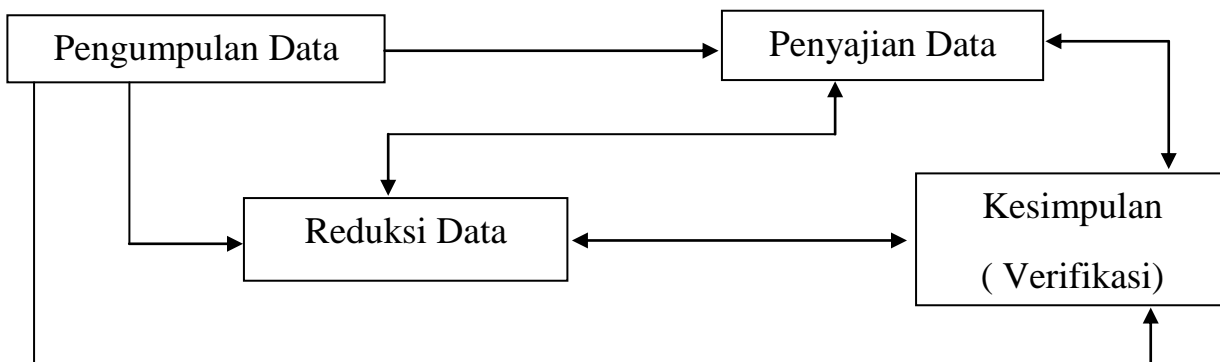
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang sangat kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

Gambar 2. Proses Analisis Data



Sumber : Miles and Huberman (Sugiyono, 2009 : 247)

J. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan reabilitas (derajat kepercayaan). Teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh. Setiap penelitian memerlukan kriteria untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran atas hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, standar tersebut dinamakan keabsahan data.

Kriteria dalam teknik keabsahan data dapat dilihat sebagai berikut :

1. Derajat Kepercayaan

Kriteria ini pada dasarnya menggambarkan konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi ; *pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai ; *kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang telah diteliti. Kriteria ini menggunakan teknik pemeriksaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan dengan pihak-pihak yang terlibat, memperbanyak referensi, dan juga menganalisis kasus negatif sebagai pembanding.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Kriteria keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu. Untuk melakukan pengalihan, seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan

demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

3. Kebergantungan

Kriteria kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengandakan replikasi studi. Hal yang paling utama adalah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama agar reliabilitasnya dikatakan tercapai serta mengandakan orang sebagai instrument dalam penelitian yang alamiah. Kebergantungan, selain digunakan dalam konteks pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh juga digunakan dalam konteks pemeriksaan audit kebergantungan dimana adanya pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen penelitian, proses, dan hasil penelitian yang dimulai dari penelusuran penelitian.

4. Kepastian (*Comformability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep “objektivitas” menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Artinya, objektif atau tidaknya sesuatu bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Objektif dalam pengertiannya berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Dalam penelitian kualitatif konsep objektif bukan ditekankan pada orang melainkan pada data yang diperoleh melalui audit kepastian.